

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut untuk terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan bidang sosial dan tenaga kerja.

Secara umum pembangunan di bidang sosial dan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan sosial, pelayanan prima pada masyarakat dan urusan tenaga kerja.

Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah melalui upaya peningkatan kualitas pencari kerja, tenaga kerja, hidup masyarakat, pengembangan potensi kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial dan pengembangan keserasian kebijakan publik serta pengembangan system informasi .

Untuk melaksanakan pembangunan bidang sosial dan tenaga kerja tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 pada pasal 10, ayat 1 dan 2 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah, disebutkan :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pembangunan sosial ekonomi suatu daerah selalu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia khususnya pembangunan sektor kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasi, karena merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dimengerti karena setiap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sosial berdampak pada terciptanya kesempatan kerja yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran yang ada di daerah. Oleh karena itu pembangunan harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan lapangan kerja yang produktif, dinamis dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dampak positif dari kegiatan pembangunan tersebut

dapat mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial dan menampung arus ledakan angkatan kerja setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan **VISI** dan **MISI** yang telah ditetapkan diarahkan pada pembentukan kota **pendidikan** dan **pariwisata**, sehingga pembangunan disegala sektor mau tidak mau harus mengarah pada visi tersebut, ketenagakerja dan ketransmigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sedangkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2008 mengatur tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rician Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Melalui pembahasan yang cukup mendalam dan dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka **VISI** Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA SEUTUHNYA, PENANGANAN

KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN YANG MANDIRI SERTA BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan Visi tersebut perlu didukung dengan sarana kebijakan yang lebih konkrit dan terarah, sehingga Visi tersebut bukan hanya merupakan slogan atau retorika belaka, namun lebih dari itu adalah merupakan sasaran akhir yang akan dijadikan tujuan.

Oleh karena itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyusun sarana kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Mewujudkan profesionalisme SDM internal dan optimalisasi ketatausahaan.
2. Mewujudkan pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan pelayanan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan kesempatan kerja.
4. Mewujudkan terciptanya hubungan industri yang harmonis dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang

kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kesejahteraan sosial;
5. Melaksanakan ketatausahaan dinas.

C. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 terdapat beberapa kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota. Adapun lingkungan strategis tersebut meliputi masalah kepegawaian, sarana prasarana dan anggaran.

Gambaran kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota sampai dengan Bulan Desember 2011 sebanyak 122 orang yang terdiri dari 61 orang laki-laki dan 61 orang perempuan dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 8 orang, SLTA

sebanyak 40 orang, D III sebanyak 8 orang, D IV sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 56 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Jumlah tersebut baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan volume pekerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta

Adapun susunan personil menurut eselon adalah :

Eselon II	: Kepala Dinas	: 1 orang
Eselon III	: Sekretaris	: 1 Orang
Eselon III	: Kepala Bagian/Kepala Bidang	: 4 orang
Eselon IV	: Kasubbag/Kasi/Kepala UPT	: 17 orang

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Gol.Ruang, di Lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2011

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah Personil
1.	Pembina Utama Muda -IV/c	1 orang
2.	Pembina Tk. I - IV/b	5 orang
3	Pembina- IV/a	6 orang
4	Penata Tk. I - III/d	26 orang
5	Penata III/c	12 orang
6	Penata Muda Tk.I - III/b	29 orang
7	Penata Muda- III/a	15 orang
8	Pengatur Tk.I - II/d	1 orang
9	Pengatur - II/c	5 orang
10	Pengatur Muda Tk. I - /Iib	5 orang
11	Pengatur Muda - II/a	12 orang
	Juru Tk. I - I/d	3 orang
12	Juru - I/c	1 orang
13	Juru Muda - I/a	1 orang
Total Keseluruhan		122 Orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, di Lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Pendidikan	Jumlah Personil
1.	Strata 2	4
2.	Strata I	56
3	D IV	4
4	D III/ SM	8
5	SLTA / Sederajat	40
6	SLTP / Sederajat	8
7	SD	2
Total Keseluruhan		122 Orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Jenis Kelamin	Jumlah Personil
1.	Laki – laki	61
2.	Perempuan	61
Total Keseluruhan		122 Orang

Di samping 122 orang Pegawai Negeri Sipil, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki Tenaga Bantu (Naban) yang bekerja baik di Dinas maupun di UPT yaitu UPT Panti Anak Terlantar Wiloso Projo, Panti Wreda Budhi Dharma dan Panti Karya Karanganyar, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah NABAN Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2011

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Personil
1.	Dalam lingkungan Dinsosnakertrans	3
2.	UPT Panti Wiloso Projo	2
3	UPT Panti Wreda Budhi Dharma	5
4	UPT Panti Karya Karanganyar	9
Total Keseluruhan		19 Orang

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Jika dibandingkan dengan beban pekerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang besar, sarana prasarana yang dimiliki masih sangat kurang sehingga masalah tersebut sangat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Adapun secara rinci sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam lampiran

3. Anggaran

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2011 jumlah anggaran yang dibiayai dari APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp. 11.761.912.873,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.514.494.273,-
- Belanja Langsung : Rp. 6.247.418.600,-

Dari anggaran APBD sebesar Rp.11.761.912.873,- terealisasi Rp.11.228.618.114,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung dari Rp.5.514.494.273,- terealisasi Rp.5.322.895.875,-

- Belanja Langsung dari Rp. 6.247.418.600,- terealisasi Rp.5.905.722.239,-

Selain dana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga mendapat alokasi dana Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah melalui anggaran belanja pendapatan daerah sebesar Rp. 3.488.210.000,-, yang terealisasi sesuai SPJ sebesar Rp. 3.335.998.000,-
Selain dari APBD, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memperoleh anggaran yang berasal dari APBN (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 897.100.000,- yang terealisasi sesuai dengan SPJ sebesar Rp.545.139.900,-.

D. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011.

Adapun visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang diinginkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, maka visi yang ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Menuju Kemandirian Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Seutuhnya dan Penanganan Ketenagakerjaan Serta Ketransmigrasian yang Mandiri dan Berkelanjutan“

2. Misi

Untuk melaksanakan visi tersebut, Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan profesionalisme SDM internal dan optimalisasi ketatausahaan.
- b. Mewujudkan Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- c. Mewujudkan pelayanan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan kesempatan kerja
- d. Mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah :

Tertanganinya Permasalahan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

4. Sasaran

Sasarannya adalah :

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- b. Masyarakat Penganggur dan Pencari Kerja
- c. Masyarakat Industri

5. Strategi

a. Kebijakan

- 1) Optimalisasi Ketatausahaan Dinas
- 2) Optimalisasi Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dalam rangka
- 3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah
- 4) kesejahteraan sosial.
- 5) Optimalisasi pelayanan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan kesempatan kerja
- 6) Optimalisasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan.

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2011 adalah :

- a. Administrasi Perkantoran
 - 1) Pelayanan jasa surat menyurat
 - 2) Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 6) Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 10) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - 12) Penyediaan makanan dan minuman
 - 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- b. Peningkatan Sarana dan Aparatur
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 1) Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- 2) Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial
- 3) Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP
- 4) Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 5) Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo
- 6) Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
- 7) Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar
- 8) Pendataan PMKS dan PSKS
- 9) Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial
- 10) Pemberdayaan Fakir Miskin

d. Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- 1) Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
- 2) Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial

e. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja (Fasilitasi pelatihan dan pemagangan)
- 2) Kegiatan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja

f. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

- 1) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

3) Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

g. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1) Kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
Kerja

2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan
Hukum Terhadap K3

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinsosnakertrans Kota
Yogyakarta, program kerja yang direncanakan untuk tahun 2011 untuk
kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi masalah pelayanan kesejahteraan sosial
- b. Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam
panti sosial
- c. Pembinaan dan pemberian santunan kematian pemegang KTP
- d. Peningkatan pelayanan dan pembinaan masalah kesejahteraan sosial
- e. Pelayanan anak terlantar di Panti Anak Wiloso Projo
- f. Pelayanan jompo terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma,
- g. Pelayanan gelandangan dan pengemis di Panti Karya Karanganyar
- h. Pendataan PMKS dan PSKS
- i. Koordinasi pelayanan bantuan sosial
- j. Pemberdayaan fakir miskin
- k. Peningkatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA

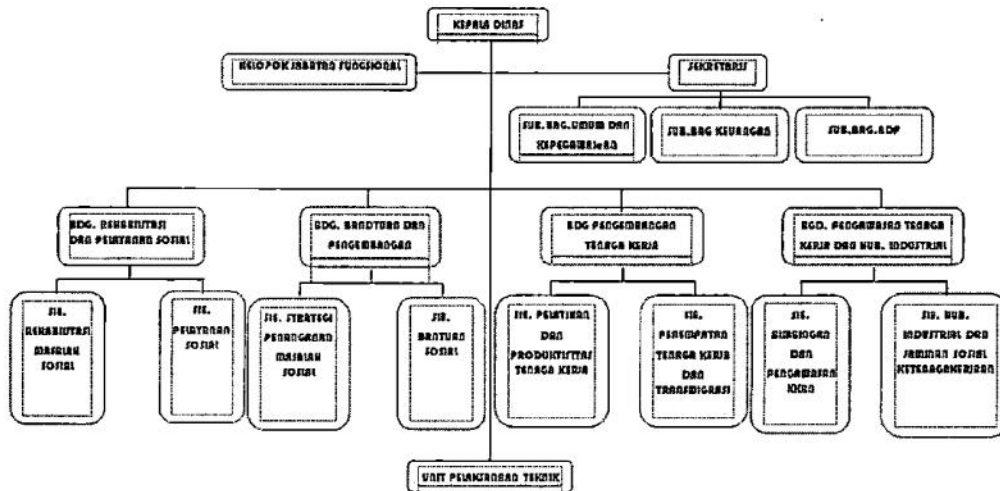
1. Bimbingan dan peningkatan kualitas sumber pembangunan kesejahteraan sosial.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Penduduk Kota Yogyakarta yang menyandang masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Anak balita terlantar
- b. Anak terlantar
- c. Anak nakal
- d. Anak jalanan
- e. Korban tindak kekerasan
- f. Lanjut usia terlantar
- g. Penyandang cacat
- h. Tuna susila
- i. Pengemis
- j. Gelandangan
- k. Korban penyalahgunaan NAPZA
- l. Pekerjaan migran bermasalah sosial
- m. Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan
- n. Wanita rawan sosial ekonomi

7. Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 pasal 10 ayat

1 Tahun 2008, susunan organisasi dan tata kedudukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris

Terdiri dari

- 1) Sub. Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub. Bagian Administrasi Data Pelaporan

c. Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial terdiri dari (2)

seksi yaitu :

- 1) Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial
- 2) Seksi Pelayanan Sosial

d. Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan social terdiri dari 2

seksi yaitu:

- 1) Seksi Strategi Penanganan Masalah Sosial
- 2) Seksi Bantuan Sosial

e. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja

Bidang Pengembangan Tenaga Kerja terdiri dari 2 seksi yaitu:

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

f. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

- 1) Seksi Bimbingan dan Pengawasan ketenagakerjaan
- 2) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan social ketenagakerjaan

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri 3 UPT yaitu

- 1) Unit Pelaksana Teknis Panti Anak Terlantar Wiloso Projo

Unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan panti anak terlantar.

2) Unit Pelaksana Teknis Panti Wreda Budhi Dharma

Unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan panti wreda/panti jompo.

3) Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Karanganyar

Unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan panti karya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari 4 yaitu :

- 1) Pengantar Kerja
- 2) Pegawai Perantara (Mediator)
- 3) Pengawas Ketenagakerjaan
- 4) Pekerja Sosial

E. Target yang Akan Dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta Akhir Tahun 2011

1. Tenaga Kerja

- a. Jumlah penganggur menurun menjadi : 26.100 orang (4,90 %)
- b. Jumlah pencari kerja tidak terlatih menurun menjadi: 23.787 orang (4,60 %).
- c. Jumlah perusahaan yang rawan menurun menjadi: 677 perusahaan (49 %)

2. Sosial

a. Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :

- 1) Penduduk Miskin dari 86.055 jiwa turun menjadi 77.450 jiwa
- 2) Anak Jalanan dari 330 orang turun menjadi 150 orang.
- 3) Lanjut Usia Terlantar dari 1.945 orang turun menjadi 1.750 orang.
- 4) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 3.551 kk turun menjadi 3.018 kk.
- 5) Korban Penyalahgunaan Napza 306 orang turun menjadi 275 orang
- 6) Penyandang Cacat 2503 orang turun menjadi 2253 orang

b. Kondisi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang antara lain terdiri dari:

- 1) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari 600 orang menjadi 750 orang
- 2) Lembaga/ Organisasi terdaftar menjadi dari 84 lembaga menjadi 134 lembaga
- 3) Personal Tagana dari 160 orang menjadi 250 orang
- 4) Karang Taruna pada kelompok tumbuh sebanyak 45 kelompok
- 5) Panti Pemerintah sebanyak 3 Panti
- 6) Panti Swasta sebanyak 17 Panti
- 7) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) pada tahun 2007 sebanyak 5 kelompok meningkat menjadi 10 kelompok pada tahun 2011.

- 8) Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE- FM) pada tahun 2005, sebanyak 45 kelompok meningkat menjadi 50 kelompok pada tahun 2011.
- 9) Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP – KM) pada tahun 2005 sebanyak : 106 kelompok meningkat menjadi 125 kelompok pada tahun 2011.